

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik¹ pada umumnya merupakan bagian yang sangat penting, dimana manusia mendambakan suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih kondusif bagi peningkatan martabat dan hak-hak asasi manusia. Ini tentunya ada pada setiap negara. Suatu kewajaran apabila antara negara yang satu dengan negara lainnya mempunyai tujuan yang berbeda. Karena setiap komunitas, apalagi komunitas besar, pasti mempunyai pemikiran dan tujuan yang tidak sama.

Studi politik bermula ketika manusia merasa mampu menciptakan suatu pemerintahan yang sesuai dengan prinsip yang disepakati bersama. Mulanya penemuan menyangkut permasalahan politik di masa Yunani kuno, yaitu ketika jagad raya ini tidak lagi dianggap lagi sebagai anugerah para dewa, dan disaat realitas dunia fisik mulai dianggap sebagai ilmu. Plato yang kemudian diikuti oleh Aristoteles² berpendapat bahwa manusia mampu memerintah dirinya sendiri. Plato tidak menafikan tentang perlunya keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat atau negara. Akan

¹ Kata politik diambil dari bahasa Yunani *Politikos* atau juga bahasa latin *politicia*, dimana mempunyai kata dasar *polis* yang berarti kota atau negara. Pada awalnya pemahaman orang Yunani tentang politik sebagai negara kota atau polis. Politik berarti apa-apa yang berhubungan dengan pemerintahan. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 857.

²Aristoteles merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah hewan politik

tetapi keselarasan ini bukan berarti harus menyamakan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Melainkan kepentingan individu harus menyesuaikan diri dengan kepentingan negara atau kepentingan masyarakat.³ Hal ini kemudian memicu munculnya pemikiran politik, mereka berusaha mencari konsep politik yang sesuai dan ideal bagi manusia dengan mengadakan penyelidikan dan penafsiran terhadap negara dan pemerintahan yang ada.

Tarik ulur tentang konsep negara dan relasinya dengan konsep lainnya misalkan saja konsep agama seakan-akan tidak pernah habis-habisnya untuk diperdebatkan. Tidak dipungkiri bahwa konsep negara merupakan hal yang menarik. Dalam Islam, konsep suatu negara tidak dijelaskan secara detail,⁴ namun yang ada adalah sejumlah tata nilai dan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara.⁵ Seperti Imam Ghazali mengatakan bahwa syari'at adalah asas, dan kerajaan adalah penjaga. Di sini ada anggapan mengenai syari'at sebagai asas yang sudah lengkap dan siap pakai

³ Ma'mun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais Tentang Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 34.

⁴ Ada yang menganggap bahwa dalam ajaran Islam sendiri tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana cara mengatur negara itu sendiri, karena konsep kenegaraan dalam Islam tidak pernah baku tentang teori ini (baca: sistem politik), mulai dari zaman Nabi saw., para sahabat, tabi'in, sampai pada para intelektual dan politisi Islam sekarang ini. Dengan situasi yang seperti itulah, tidak jarang dan bahkan sering sekali akan menimbulkan konflik dan peperangan yang akhirnya bermuara pada perpecahan dan hilangnya persatuan Islam dan rasa kebersamaan diantara umat Islam itu sendiri. Dari sisi lain ada anggapan pemikiran yang menghendaki bahwa Islam tidak harus secara simbolik masuk dalam kehidupan negara, tetapi yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai dan prinsip Islam itu masuk dalam sejarah kehidupan politik dan bernegara, baik melalui pendekatan spritual atau kultural dengan akhlakul karimah seperti yang dilakukan Nabi saw. yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan mesra antar sesama rakyat. Lihat AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, hlm. 5

⁵ Hal ini senada dengan pendapat Fazlurrahman bahwa tujuan dari Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika yang membuat mereka dapat bertahan dimuka bumi ini. Lihat Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Raman* (Jakarta : UI-Press, 2000), hlm. 111

dan pemerintah tinggal memberlakukannya. Penegakan syari'at merupakan kewajiban yang dibebankan Islam kepada pemeluknya. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengatakan bahwa Islam adalah *Din* dan *Syar'i*,

Islam memberikan larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai segi kehidupan. Namun tidak semua orang yang meyakini ajaran ini mengamalkannya secara sukarela. Hawa nafsu dan motivasi pribadi dapat menyebabkan orang mengabaikan perintah dan larangan agama. Adapun pemikir Islam lainnya seperti Hassan al-Banna menegaskan bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karenanya perjuangan perkembangan politik untuk menyebar dakwah merupakan suatu tugas dengan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pemerintah Islam tegak atas kaidah-kaidah yang sudah populer. Kaidah-kaidah tersebut merupakan kerangka pokok pemerintahan Islam, kaidah-kaidah itu adalah tanggungjawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan sikap saling menghargai aspirasi masyarakat.⁶

Sebelum Indonesia merdeka ada beberapa pergerakan yang berjuang menuju tercapainya kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada yang berasaskan kebangsaan, yakni semata-mata untuk kepentingan bangsa tanpa menjadikan agama tertentu sebagai pandangan politik dan sumber inspirasi. Di pihak lain ada yang sebaliknya, yaitu perjuangannya berdasar dan bercorak agama tertentu. Pihak pertama tidak menghendaki dan bahkan melarang orang melibatkan agama dalam segala pembicaraan umum, serta tidak

⁶Hasan al-Banna, *RisalahPergerakan Islam IkhanulMuslimin*, (Surakarta: Era Intermedia, 1999), hlm. 298.

menghendaki Islam dijadikan dasar suatu bangsa meskipun mereka itu sebagai pemeluk Islam. Inilah yang oleh Ahmad Hassan disebut golongan “netral agama”.

Ahmad Hassan memandang sikap ini sebagai penyempitan langkah mempersatukan bangsa Indonesia, karena pada hakekatnya, sikap ini mengarah pada benci agama. Ia menerima sikap netral agama itu jika diartikan sebagai suatu sikap memberi kesempatan orang untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ahmad Hassan menganggap kenyataan saat itu menunjukkan bahwa paham kebangsaan dipakai oleh pergerakan yang bersikap tidak tahu menahu agama mereka untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya akan dilaksanakan hukum-hukum Islam.

Secara implisit di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menerangkan secara langsung tentang negara Islam dan tentang siapa yang harus memegang kekuasaan lebih besar tidak diterangkan. Apakah negara atau rakyat masih menjadi perdebatan. Sehingga tidak heran jika banyak kalangan yang kemudian berdebat panjang tentang konsep negara yang ideal bagi umat Islam sehingga banyak melahirkan para pemikir-pemikir yang mencoba untuk menawarkan penginterpretasian atau gagasan tentang konsep negara. Salah satu diantaranya adalah Ahmad Hassan. Menurutnya negara harus berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta menolak nasionalisme karena merupakan perbuatan *ashabiyah*, sedangkan *ashabiyah* dalam beberapa hadis menerangkan bahwa orang yang berperang dan berjuang atas dasar *ashabiyah*

adalah tidak termasuk golongan umat Muhammad Saw dan bertentangan dengan ajaran Islam.⁷ Dalam kerangka inilah penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang konsep negara menurut Ahmad Hassan. Mengingat beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan Islam di Indonesia.

Membaca Ahmad Hassan dari aktivisme politiknya memang tidak akan menemukan sesuatu yang terlalu *powerfull* mengingat posisi Ahmad Hassan yang bukan politisi dan lebih memosisikan dirinya sebagai guru. Sebagai guru ia telah melahirkan politisi-politisi handal dan berkarakter seperti M. Natsir dan M. Isa Anshary. Kedua-duanya adalah murid Ahmad Hassan di Persatuan Islam dan menjadi aktivis masyumi setelah zaman kemerdekaan. Ahmad Hassan sendiri memilih untuk tidak ikut terjun dalam politik praktis dan tetap memosisikan diri sebagai guru.⁸

Ahmad Hassan lahir pada tahun 1887 M. di Singapura.⁹ Bagi peminat soal-soal agama di Indonesia, nama Ahmad Hassan bukan merupakan sesuatu yang asing. Karya-karyanya telah tersebar luas di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara umumnya. Ahmad Hassan banyak menulis tentang agama yang berupa nasihat, anjuran berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Beliau juga mengetengahkan berbagai-bagai persoalan yang dikembangkannya dalam bentuk syair. Tulisannya banyak mengandungi

⁷Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, (Cet. II; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994 M), hlm. 34

⁸Tiar Anwar Bachtiar, *Risalah Politik A. Hassan* (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013), hlm. XXIII.

⁹Syafiq A. Mughni, *loc.cit*, hlm. 11.

kritikan masyarakat demi untuk kemajuan Islam. Dan tema tulisan sedemikian itulah yang banyak mewarnai hasil karyanya pada masa-masa berikutnya.

Ahmad Hassan juga adalah orang yang memberikan pencerahan tentang Islam kepada Soekarno. Perkenalannya dengan Bung Karno diawali ketika keduanya sama-sama bertemu di percetakan *Drukerij Economy* milik orang Cina. Pada waktu itu Soekarno sedang mencetak surat kabar Propaganda politiknya Fikiran Rakyat, sementara Ahmad Hassan mencetak majalah-majalah dan buku-buku yang ia terbitkan. Dalam setiap pertemuannya di percetakan itu, antara keduanya sering terjadi dialog berbagai masalah. Rupanya sejak bergaul dengan Ahmad Hassan, Soekarno yang tadinya kurang memahami betul tentang Islam, sedikit demi sedikit terbuka hatinya. Demikianlah, Soekarno mulai banyak belajar agama Islam kepada Ahmad Hassan meski pada tahap permulaan hanya melalui obrolan di percetakan. Lambat laun Soekarno belajar lebih aktif melalui buku dan majalah-majalah karangan Ahmad Hassan.¹⁰

Terlebih lagi ketika Soekarno menjalani hukuman pembuangan oleh pemerintah kolonial Belanda di Ende Flores. Dalam kesepiannya, Soekarno merasa terhibur dengan datangnya kiriman buku-buku dan majalah-majalah dari Ahmad Hassan. Setiap kapal yang merapat di Ende, selalu membawa kiriman dari Bandung; dari Tuan Hassan, tidak hanya buku dan majalah tapi juga makanan kegemaran Bung Karno, biji jambu mede. Sejak di Ende

¹⁰Siddiq Amien, dkk, *Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyah Persis*, (Bandung: PP PERSIS, 2007 M), hlm. 147.

Flores itulah, Soekarno mengakui Ahmad Hassan sebagai gurunya dalam hal agama. Lihatlah beberapa surat yang dikirimkan kepada Ahmad Hassan yang terdapat dalam buku karangan Soekarno *Dibawah Bendera Revolusi* dalam satu bab khusus surat-surat Islam dari Endeh; Dari Ir. Soekarno Kepada Tuan A. Hassan, Guru “Persatuan Islam”.¹¹

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang memotivasi mengangkat judul penelitian ini adalah :

1. Ahmad Hassan adalah seorang pemikir yang sangat berpengaruh terhadap pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia terutama di organisasi Persatuan Islam (PERSIS).
2. Pemikirannya tentang konsep negara berbeda dengan para pemikir lainnya

C. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana konsep negara menurut pemikiran Ahmad Hassan?

¹¹*Ibid.* hlm. 154

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana konsep negara menurut pemikiran Ahmad Hassan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah kepustakaan tentang pemikiran tokoh Islam Indonesia tentang masalah Kenegaraan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna dalam pengembangan wawasan para pembaca pada umumnya dan mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat pada khususnya dalam mendalami dan memahami pemikiran tokoh-tokoh di Indonesia.
- c. Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Ushuluddin.

E. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang pemikiran Ahmad Hassan banyak dilakukan oleh para peneliti. Hal tersebut disebabkan pemikirannya yang cukup cemerlang dalam keilmuan Islam. Kajian ini perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Kemudian penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dengan teori-teori yang dipakai dalam analisa, yang tentunya akan berbeda dengan penulis-penulis lainnya.

Adapun para peneliti yang membahas tentang pemikiran Ahmad Hassan diantaranya;

1. *Studi Analisis Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Hukum Shalat Sesudah Mandi Tanpa Wudhu*, diteliti oleh Qomaruddin pada tahun 2005. Dalam penelitian ini membahas tentang Pendapat Ahmad Hassan tentang Hukum Shalat Sesudah Mandi Tanpa Wudhu, Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang shalat, Bab III membahas tentang pendapat Ahmad Hassan tentang hukum shalat sesudah mandi tanpa wudhu, yang terdiri dari: Biografi Ahmad Hassan, pendapat Ahmad Hassan tentang hukum shalat sesudah mandi tanpa wudhu, dan metode istinbath Ahmad Hassan. Dan bab IV membahas tentang analisis pendapat Ahmad Hassan tentang hukum shalat sesudah mandi tanpa wudhu, yang membahas tentang analisis pendapat Ahmad Hassan tentang hukum shalat sesudah mandi tanpa wudhu dan metode instibath Hukum Ahmad Hassan tentang hukum shalat sesudah mandi tanpa wudhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mesti wudhu lagi setelah mandi, karena dengan mandi itu sudah cukup sebagai pengganti wudhu untuk shalat. Metode istinbath hukum Ahmad Hassan didasarkan pada hadis dari Aisyah ra, bahwa Nabi saw. tidak wudhu setelah mandi, dan hadis dari Ibnu Umar, ketika Nabi ditanya tentang wudhu setelah mandi. Beliau menjawab wudhu yang mana yang lebih rata daripada mandi. Dengan syarat mandinya merata sampai seluruh tubuh dan ada niat dengan mandinya itu untuk melaksanakan shalat.

2. *Tela'ah Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Problematika Sosial Keagamaan dalam Buku Islam dan Kebangsaan* diteliti oleh Dewi Noviana pada tahun 2007. Dalam penelitian ini membahas tentang pesan dakwah Ahmad Hassan Tentang Problema Sosial Keagamaan Ditinjau dari Teori Problema Sosial Keagamaan yang Ada. Bab I membahas tentang tinjauan umum tentang dakwah dan problema sosial keagamaan, Bab II membahas tentang pemikiran dakwah Ahmad Hassan tentang problema sosial keagamaan dalam hukum Islam dan Kebangsaan. Dan Bab IV membahas tentang pesan dakwah Ahmad Hassan, yang terdiri dari: Pokok-pokok pemikiran dakwah Ahmad Hassan tentang problema sosial keagamaan, dan relevansi pesan dakwah Ahmad Hassan dengan dakwah saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ahmad Hassan, bila di negara Indonesia menganut pemerintahan Islam dengan penegakan hukum Islam, maka bagi pemeluk agama lain tidak perlu cemas karena Islam memberikan kemerdekaan menjalankan agama menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Menurut Ahmad Hassan, agama Islam melarang umat Islam menolong sesamanya atas dasar kebangsaan, melarang menyeru manusia dengan beraskan kebangsaan. Islam melarang umatnya berperang atas dasar kebangsaan; dan orang yang mati atas keadaan demikian, dipandang mati sesat. Menurut Ahmad Hassan, dasar pemerintahan secara Islam itu; Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih serta asas musyawarah. Menurut Ahmad Hassan, agama Islam tidak

mementingkan bentuk dan nama. Walaupun sejarah Islam mengungkapkan adanya “Imamah” dan “Khilafah”.

Menurut Ahmad Hassan, bahwa ajaran Islam harus diwujudkan dalam kehidupan negara. Alat-alat negara harus melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun dalam Islam tidak mengatur persoalan negara secara detail tapi prinsip-prinsipnya ada dalam Alquran dan Al-Hadis. Persoalan bagaimana bentuk negara dan pemerintahan itu, maka hal ini menyangkut persoalan ijtihad.

3. *Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Tanpa Wali* diteliti oleh Wirdah Rosalin pada tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang pendapat Ahmad Hassan tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Bab II membahas tentang tinjauan secara umum tentang wali nikah, bab III membahas tentang pendapat Ahmad Hassan tentang bolehnya menikahi wanita gadis tanpa wali, yang terdiri dari: Biorafi Ahmad Hassan, pendapat Ahmad Hassan tentang bolehnya menikahi wanita gadis tanpa wali, dan istinbath hukum Ahmad Hassan tentang bolehnya menikahi wanita gadis tanpa wali. Dan Bab IV membahas tentang pendapat Ahmad Hassan tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali, yang terdiri dari: Analisis pendapat Ahmad Hassan tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali, dan analisis metode istinbath hukum Ahmad Hassan tentang bolehnya wanita gadis menikahi tanpa wali. Hasil penelitiannya, Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-

keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali. Metode istinbath hukum yang digunakan Ahmad Hassan, ia ternyata menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk dibolehkannya wanita gadis menikah tanpa wali.

4. *Analisis Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Pendidikan Islam dan Implementasinya di Lembaga Persatuan Islam (PERSIS)*” diteliti oleh Sheiha Sajieda pada tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang konsep pendidikan menurut pemikiran Ahmad Hassan. Bab II membahas tentang konsep pendidikan Islam, Bab III membahas tentang metode pendidikan Islam, yang terdiri dari: Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, sumber data dan analisis data. Dan Bab IV membahas tentang Analisis Hasil Penelitian, yang terdiri dari: Konsep pendidikan menurut pemikiran Ahmad Hassan, dan pendapat para pakar dengan konteks sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemikiran Ahmad Hassan dipengaruhi oleh pola pemikiran tokoh pembaharu Islam dari Timur Tengah seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Rasyid Ridha. Ahmad Hassan bersama Persis merancang konsep pendidikan Islam yang mencakup delapan unsur pendidikan. Seperti adanya tujuan pendidikan, muatan pendidikan, alat dan media pendidikan, tugas dan fungsi pendidik, peserta didik, metode pengajaran dan sistem evaluasi.

Bertolak dari pemaparan di atas, kajian ini akan berbeda karena penulis akan lebih jauh mengungkapkan pandangan politik Ahmad Hassan terutama tentang konsep negara. Dimulai dari akar filsafat politiknya sampai sebisa mungkin untuk mengajukan evaluasi kritis terhadap pemikiran Ahmad Hassan. Di sinilah letak karakteristik dan keistimewaaan penelitian ini. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap pemikiran politik masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini diambil dari buku yang ditulis langsung oleh Ahmad Hassan yaitu *ABC Politik, Kedaulatan Rakyat, Islam dan Kebangsaan, dan Debat Kebangsaan*. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diantaranya; *Hassan Bandung & Kontribusi Pemikirannya Bidang Hukum Islam, Persatuan Islam; Sejarah Pembaharuan Pemikiran Kembali Kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Persatuan Islam; Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, Hassan*

Bandung: Pemikir Islam Radikal, A. Hassan: Wajah dan Wajah Seorang Muftahid, A. Hassan, Persis, dan Pemikiran Fikihnya, Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari sumbernya langsung dan dikumpulkan dengan cara mengutip, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung.

Setelah data diperoleh sebagaimana yang diharapkan, penulis melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap data tersebut dan kemudian dikelompokkan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menetapkan judul yang akan diteiti, adapun judul yang akan dibahas dalam kajian ini adalah “*Negara Menurut Pemikiran Ahmad Hassan*”
- b. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang berkaitan dengan penokohan Ahmad Hassan, pemahamannya terhadap negara atau politik, kemudian mengumpulkan pandangan-pandangannya yang berkaitan dengan kenegaraan.
- c. Kemudian data yang diperoleh tersebut dibahas terlebih dahulu, kemudian dikaitkan satu sama lainnya sehingga bisa dijadikan sebagai paparan yang jelas dan mudah dipahami.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan berupa pemikiran Ahmad Hassan dalam karya-karyanya dan literatur yang ada kaitannya dalam kajian ini. Data yang telah disusun dan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan cara membaginya menjadi lima bab, dan masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang di dalamnya berisikan; Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Biografi Ahmad Hassan, yang berisikan tentang; Riwayat Hidup Ahmad Hassan, Pendidikan Ahmad Hassan, Pengaruh Pemikirannya dan Karya-karya Ahmad Hassan.

BAB III Merupakan Landasan Teoritis yang berisikan tentang Konsep Negara Secara Umum dan Konsep Negara Menurut Tokoh Muslim

BAB IV Merupakan Analisis Pemikiran Ahmad Hassan Mengenai Konsep Negara yang berisikan tentang Kekuatan dan Kelemahan Negara Menurut Ahmad Hassan dan Posisi pemikirannya.

BAB V Merupakan Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.